

POSTMODERNISME DAN PENDIDIKAN DI INDONESIA (Sebuah Refleksi Filosofis)

Dwi Septiwiharti, S.S., M. Phil.

Abstrak

Artikel ini merupakan kajian filsafati tentang pemikiran posmodernisme dan relevansiya bagi pelaksanaan pendidikan di Indonesia dewasa ini. Posmodernisme adalah paradigma berpikir dan sikap yang kritis terhadap pola pikir dan prinsip-prinsip modernisme; terutama kritik atas pemikiran Rene Descartes. Salah satu filsuf posmodern yang ditelaah dalam tulisan ini adalah Derrida. Posmodernisme ingin menyadarkan bahwa realitas itu bersifat kompleks. Pendidikan posmodern bertolak dari paradigma bahwa kenyataan itu dibangun di atas realitas yang kompleks, sehingga pendidikan multikultural lebih relevan dengan paradigma posmodern tersebut. Kebinekaan (*pluralis-multikultural*) merupakan unsur yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi pendidikan dewasa ini, sehingga pendidikan itu sesuai dengan latar belakang budaya yang melandasinya. Namun, posmodernisme tidak bertendensi untuk menjadi sebuah filsafat pendidikan baru.

Kata kunci: posmodernisme, pendidikan, multikultural

A. Pendahuluan

Filsafat modern seharusnya merupakan filsafat yang anti dogmatisme, karena filsafat modern hadir sebagai bentuk pemikiran yang melepaskan diri dari belenggu pemikiran tradisional gereja di abad pertengahan yang absolut. Namun begitu, tidak sedikit filsuf modern yang berkeras untuk menjadikan sistem pemikirannya sebagai ajaran yang harus diterima karena kebenaran absolut yang diyakininya. Tak jarang pemikiran dari filsuf tertentu justru berkembang menjadi dogma baru atau setidaknya dijadikan dogma oleh para pengikut pemikiran tersebut. Hal ini misalnya terjadi pada Karl Marx dan Marxisme. Sebelum meninggal, Marx sempat memprotes para pengikutnya, bahwa ia yang bernama Marx tidaklah identik dengan Marxisme. Sedangkan 'guru' Marx, Hegel, dengan terang-terangan menyatakan bahwa filsafatnya adalah yang paling benar di dalam sejarah filsafat sistematik (Awuy, 1995: 137).

Rene Descartes yang dianggap sebagai salah satu bapak filsafat modern, sebenarnya sudah mendahului sikap totaliter Hegel. Descartes berpendirian, bahwa semua ilmu pengetahuan seharusnya bermuara dari satu metode saja, *cogito ergo sum* (aku berpikir, maka aku ada). Semangat renaissance terlihat sangat jelas sekali di dalam pemikiran Descartes, yang melalui wawasan humanismenya, menjadikan manusia -dengan segala kemampuan rasionalnya- sebagai aku (subjek) yang sentral dalam pemecahan masalah dunia. Wawasan humanisme Cartesian, dalam hal ini sangat bersifat mekanistik karena rasionalitas manusia dijadikan sebagai ukuran tunggal kebenaran (Piliang, 2003: 73).

Pemikiran modern macam ini, beserta tatanan sosial yang dihasilkannya ternyata telah melahirkan berbagai konsekuensi yang buruk bagi kehidupan manusia dan alam pada umumnya. Beberapa diantaranya adalah: *Pertama*, pandangan dualistiknya yang membagi seluruh kenyataan menjadi subjek dan objek, spiritual-material, manusia-dunia, dan sebagainya, telah mengakibatkan objektivikasi-eksploitasi alam. *Kedua*,

pandangan modern yang bersifat objektivistik dan positivistik cenderung membuat manusia menjadi objek, serta masyarakat menjadi mesin. Hal ini mengakibatkan manusia sering tidak manusiawi lagi. *Ketiga*, dalam modernisme, ilmu-ilmu positif-empiris mau tak mau menjadi standar kebenaran tertinggi, sehingga nilai-nilai moral dan religius kehilangan wibawanya. Alhasil muncullah disorientasi moral-religius yang meningkatkan kekerasan, alienasi, marjinalisasi, dan seterusnya. Konsekuensi *keempat* adalah materialisme itu sendiri. Bila kenyataan yang paling dasar tak lagi ditemukan di dalam agama, maka materilah yang mudah dianggap sebagai kenyataan penggantinya. *Kelima*, totalitarianisme menjadi semakin menemukan kekuatannya dengan berdasar pada filsafat modern yang cenderung bersifat dikotomis. Konsekuensi *keenam* adalah bangkitnya kembali tribalisme, yaitu semangat yang mengunggulkan suku, agama, ras, atau kelompok tertentu (Sugiharto, 1996: 29-30).

Istilah "Posmodernisme" muncul untuk pertama kalinya di wilayah seni. Menurut Ihab Hassan dan Charles Jencks, istilah itu pertama kali dipakai oleh Federico de Onis pada tahun 1930-an dalam karyanya, *Antologia de la Poesia Espanola a Hispanoamericana*, untuk menunjukkan reaksi yang muncul dalam modernisme. Kemudian di bidang historiografi oleh Arnold Toynbee dalam *A Study of History* (1947). Di sini, istilah tersebut merupakan kategori yang menjelaskan siklus sejarah baru yang dimulai sejak tahun 1875 dengan berakhirnya dominasi Barat, surutnya individualisme, kapitalisme, kekristenan, serta bangkitnya kekuatan budaya non-Barat. Disinggung pula di sana tentang pluralisme dan kebudayaan dunia, hal-hal yang masih esensial dalam pengertian posmodernisme kuno (Sugiharto, 1996: 24-25).

Pandangan posmodern berdiri di atas ketegangan antara kekuatan-kekuatan globalisasi di satu pihak dengan hasrat komunitas-komunitas lokal untuk mewujudkan identitas khas masing-masing yang kadang-kadang bersifat primordial di lain pihak. Kesadaran akan realitas *pluralis-multikultural* (kebinekaan) menjadi tidak terbantahkan lagi pada era ini. Multikulturalisme budaya, pandangan hidup, religiusitas, moral, dan ideologi menjadi gambaran yang tak terelakkan pada abad ini.

Istilah “Posmodernisme” dapat memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Antara lain bisa berarti, aliran pemikiran filsafat; periodisasi sejarah berikut pergeseran paradigma di dalamnya; ataupun sikap dasar tertentu. Masing-masing pengertian tersebut memiliki konsekuensi logis yang berbeda meskipun saling berhubungan juga. Jika yang kita maksudkan adalah aliran filsafat, maka ia menunjuk terutama pada gagasan-gagasan Jean. F. Lyotard, yang paling eksplisit menggunakan istilah posmodernisme. Namun, jika yang kita maksudkan adalah periode sejarah baru yang meninggalkan kerangka berpikir modern, maka mereka yang paling sibuk memetakannya, antara lain, Jencks, Andreas Huysen, dan David Harvey. Dalam hal ini, orang bisa berdebat dengan sengit tentang waktu persis terjadinya pergeseran paradigma, serta apa yang sebenarnya bergeser di dalam perjalanan waktu. Bisa jadi pergeseran itu hanyalah radikalisasi dari segala kecenderungan modern sendiri. Di sini kita dapat melihat berbagai wacana para tokoh seperti Jurgen Habermas, Anthony Giddens, Ernest Gellner, dan lainnya (Sugiharto, 2002: 50).

Dalam tulisan ini, penulis lebih memilih posmodernisme sebagai sebuah paradigma berpikir dan sikap yang kritis terhadap pola pikir dan prinsip-prinsip modernisme. Konsekuensinya adalah pemahaman yang begitu luas atas konsep posmodernisme itu sendiri. Akan tetapi, menurut Bambang Sugiharto (Ibid: 52), keluasan dapat berarti juga kekaburan. Inilah masalahnya, di mana kekaburan istilah posmodernisme sebagian besar adalah karena kekaburan istilah modern itu sendiri. “Modernisme” dalam arti yang mana, dan “Modernisme” seperti apa yang dikritik oleh “posmodernisme” itu. Gianni Vattimo memberikan istilah ‘*akhir dari modernitas*’ untuk menjelaskan kebangkrutan modernitas. Istilah seperti ini senada dengan *akhir dari filsafat* (Martin Heidegger), *akhir dari Ideologi* (Daniel Bell), *akhir dari sejarah* (Kermonde), *akhir dari Narasi Besar* (J. F. Lyotard), *akhir dari representasi, sosial, tanda, dan transendensi* (Jean Baudrillard), *akhir dari teori* (Fredric Jameson), dan *akhir dari teori seni* (Victor Burgin) (Piliang, 2003: 72).

Para pemikir posmodernisme, pada kenyataannya telah mengusulkan konsep yang berbeda-beda mengenai

posmodernisme itu sendiri. Namun setidaknya, satu hal menjadi konsensus di antara para pemikir posmodern adalah, bahwa modernitas dinyatakan telah kehilangan kemampuan kritisnya, sehingga tidak mampu lagi menemukan tujuan teleologis dan utopis yang ingin dicapainya.

Bambang Sugiharto (1996: 24) mengategorikan pemikiran posmodernisme, antara lain: posmodernisme sebagai pemutusan hubungan pemikiran secara total dengan segala pola modernisme, seperti yang tampak pada pemikiran Lyotard, Jacques Derrida dan Ernest Gellner; posmodernisme sebagai sekedar koreksi atas aspek-aspek tertentu saja dari modernisme (David R. Griffin, John Cobb Jr.); Posmodernism sebagai bentuk modernise yang akhirnya bunuh diri (Jean Baudrillard, Michel Foucault); posmodernisme sebagai bentuk arif dari modernisme yang telah sadar diri (Giddens); dan posmodernisme yang sekedar tahap dari proyek modernisme yang belum selesai (Jurgen Habermas).

Beberapa kecenderungan dasar umum posmodernisme, misalnya (Sugiharto, 2002: 52):

1. Kecenderungan menganggap klaim tentang *realitas* (diri-subyek, sejarah, budaya, Tuhan, dan lainnya) sebagai konstruksi semiotis, artifisial, dan ideologis;
2. Skeptis terhadap segala bentuk keyakinan tentang “substansi” objektif (meski tidak selalu menentang konsep tentang universalitas);
3. Realitas dapat ditangkap dan dikelola dengan banyak cara, serta dengan banyak sistem (pluralitas);
4. Paham tentang “sistem” sendiri dengan konotasi otonom dan tertutupnya cenderung dianggap kurang relevan, diganti dengan “jaringan”, “relasionalitas” ataupun “proses” yang senantiasa saling-silang dan bergerak dinamis;
5. Cara pandang yang melihat segala sesuatu dari sudut oposisi biner pun (*either-or*) dianggap tak lagi memadai. Segala unsur ikut saling menentukan dalam interaksi jaringan dan proses (maka istilah ‘posmodernisme’ sendiri harus dimengerti bukan sebagai oposisi, melainkan dalam relasinya dengan ‘modernisme’).

6. Melihat secara holistik berbagai kemampuan lain selain rasionalitas, misalnya emosi, imajinasi, intuisi, spiritualitas, dan lainnya; serta
7. Menghargai segala hal lain (*otherness*) yang lebih luas, yang selama ini tidak dibahas atau bahkan dipinggirkan oleh wacana modern, misalnya kaum perempuan, tradisi lokal, agama, dan sebagainya.

B. Dekonstruksi Derrida: Kritik Atas Tradisi Metafisika dan Epistemologi Barat

Déconstruction, sebuah kata dalam bahasa Perancis yang telah mengglobal dan merasuki berbagai bahasa karena menjadi salah satu jargon posmodernisme. Kata yang semula dikenal di dalam lingkungan filsafat ini telah menerobos masuk ke dalam berbagai wilayah keilmuan, mulai dari kajian sastra, arsitektur, teologi, seni rupa, politik, pendidikan, kritik musik dan film, hukum, hingga sejarah. Dekonstruksi mewakili sebuah hasrat dan cita-cita untuk membongkar bangunan yang sudah mapan dan meruntuhkan sebuah konstruksi.

Tidak heran jika dekonstruksi menjadi jargon bahkan senjata bagi kelompok anti-kemapanan. Sebaliknya bagi pendukung tradisi yang telah mapan, dekonstruksi seting dicibir sebagai *gimmick intellectual*, yang tidak memenuhi standar ilmu pengetahuan. Bahkan, dekonstruksi dituduh sebagai permainan bebas yang nihilistik.

Menurut Derrida, tradisi metafisika Barat berbentuk Logosentrisme. Yang dimaksud Derrida dengan Logosentrisme adalah bentuk rasionalisme yang mensyaratkan 'kehadiran' di dalam bahasa dan teks. Gagasan, tujuan, kebenaran, makna atau acuan dari bahasa bertindak sebagai wahana yang tersedia dan nyaman dari ekspresi kehadiran (Rice, 1996: 173). Dari sini kemudian dikenal istilah 'Metafisika Kehadiran.' Hadir berarti berada dan terlibat dalam sesuatu hal dan juga pada kekinian. Tekanannya pada keadaan kini dan disini, sehingga berdimensi ruang dan waktu. Hasil dari tradisi pemikiran ini adalah dominasi dari yang dianggap sebagai *makna, pusat, atau asal*.

Metafisika kehadiran mendasarkan diri pada logika yang dikembangkan oleh Aristoteles. Prinsip logika Aristotelian yang

pertama adalah, *prinsip persamaan*, bahwa segala sesuatu itu senantiasa identik atau sama dengan dirinya ($A = A$). Yang kedua adalah, *prinsip non-kontradiksi*, dimana sesuatu itu senantiasa tidak sama atau berbeda dengan selain dirinya ($A \neq \text{Non-A}$). Prinsip ketiga, adalah *prinsip penyisihan jalan tengah atau penyisihan dari kemungkinan ketiga*, dimana tidak ada alternatif lain selain A atau non-A, sehingga menutup kemungkinan lain di luar keduanya (Widiadharna, 2005: 38). Akibat dari tradisi logika Aristotelian ini adalah kecenderungan berpikir dikotomis. Segala sesuatu harus jelas posisinya sebagai hitam atau putih. Disinilah berkembang logosentrisme yang menciptakan oposisi hierarkis yang berakhir pada dominasi dari satu posisi atas posisi yang lain. Menurut Derrida, inilah ciri logosentrisme (Deschamps, 2003: 149-156).

Hal-hal di atas inilah yang dipersoalkan oleh Derrida. Secara radikal, ia mempertanyakan gagasan-gagasan mengenai kehadiran, kebenaran, pengetahuan, serta otoritas yang ada di dalam tradisi filsafat Barat. Upaya yang dilakukan Derrida ini dapat dilihat sebagai upaya untuk melakukan penafsiran kembali tradisi filsafat barat yang logosentris dan mendahulukan kehadiran. Bagi Derrida, filsafat barat merupakan teks yang senantiasa terjalin dari berbagai unsur, yang selalu memiliki kemungkinan untuk saling berhubungan dengan teks-teks lain.

Upaya semacam inilah yang dinamakan *dekonstruksi*. Derrida menjelaskan maksud dekonstruksi dalam konteks pemikiran Heidegger tentang konsep *Destruktion* (penghancuran), dan *Abbau* (pembongkaran). Bagi Derrida, dekonstruksi bukanlah destruksi yang berarti penghancuran ataupun pemusnahan, tetapi untuk menjelaskan dua gerakan yang berlangsung, yaitu pengacakan dan juga penataan ulang. Derrida menyatakan bahwa dekonstruksi terlalu sulit untuk didefinisikan dan diterjemahkan. *Pertama*, karena istilah apapun yang digunakan untuk menerjemahkan atau mendefinisikannya dengan menawarkan suatu makna ataupun konsep yang bersifat definitif, dengan sendirinya membuka peluang untuk berlangsungnya suatu operasi dekonstruktif. *Kedua*, Derrida menolak adanya konsep yang terlepas atau melampaui kata-kata. Ia menolak adanya suatu konsep dekonstruksi yang hadir ke

dunia yang berada di luar kata-kata yang terangkum di dalam berbagai frasa ataupun kalimat. Untuk menjelaskan suatu kata dibutuhkan kata-kata yang lain, begitu seterusnya (Widiadharna: 41).

Walaupun sulit untuk didefinisikan, dekonstruksi dapat dijelaskan dengan menghubungkannya dengan hal lain seperti dalam konteks metafisika kehadiran. Bagi Derrida, filsafat Barat selama ini merupakan *logologi* (ilmu tentang perkataan atau bahasa lisan). Dalam perspektif ini, bahasa sama dengan *phoné* (suara atau tuturan). Tradisi logologi filsafat Barat ini ingin diubah oleh Derrida menjadi *Grammatologi* (ilmu tentang huruf-huruf atau inskripsi). Melalui Grammatologi, Derrida melakukan dekonstruksi atas filsafat Barat, dengan meruntuhkan hierarki tuturan atas tulisan (Derrida, 1981: 41).

Dalam hal ini, pemikiran Derrida selalu merupakan pemikiran tentang sebuah teks, dan dekonstruksi selalu terkait dengan pembacaan atas teks (Critchley, 1999:22). Derrida mengatakan bahwa, membaca adalah langkah pertama, langkah paling dasar, yang dimaksudkan Derrida adalah persoalan pembacaan kritis (Derrida 1976: lxxxix). Critchley (1999: 23) membedakan dekonstruksi dari aktivitas tekstual lain dengan istilah *double reading*, yaitu sebuah pembacaan yang saling berkaitan paling tidak dalam dua sisi atau dua lapisan. Di satu sisi, pembacaan ini bermaksud untuk menampilkan kembali apa yang disebut Derrida sebagai "tafsiran dominan" atas sebuah teks (yang berbentuk komentar), dan di sisi lain, pembacaan ini meninggalkan tatanan komentar, dan memperlihatkan titik lemah dan kontradiksi dalam tafsiran dominan tersebut, lalu menyajikan pembacaan yang lain. Gagasan Critchley tentang 'double reading' ini serupa dengan tafsiran dari Edward Said yang mengatakan bahwa 'metode' Derrida bercirikan penulisan ganda (*écriture double*) (Said 1983: 185).

Bagi Derrida sendiri, 'komentar' sudah merupakan penafsiran. Derrida tidak percaya bahwa sebuah teks dapat diulang dan ditampilkan lagi secara murni tanpa distorsi. Tetapi, ia percaya adanya sebuah konsensus minimal atas makna sebuah teks yang diperoleh dari struktur sebuah teks atau maksud dari pengarang atas teks tersebut. Maksud komentar tidak lain adalah

menampilkan kembali tafsiran dominan tersebut. Derrida mengakui bahwa komentar penting bagi upaya kritis, walaupun komentar selalu hanya sekedar *mencegah* tanpa pernah membuka, sehingga komentar selalu berujung pada makna tunggal yang dominan. Padahal bagi Derrida, sebuah teks tidak bermakna tunggal, tetapi selalu terbuka. Inilah yang dimaksudkan dekonstruksi dengan membebaskan pluralitas makna teks dari represi yang dilakukan struktur ataupun maksud dari pengarang (Derrida, 1982: 158).

Mengenai strategi umum dekonstruksi, Derrida berpendapat, bahwa dalam tradisi metafisika Barat tidak terjadi koeksistensi damai dari dua hal yang berhadap-hadapan (*vis-a-vis*), tetapi lebih berbentuk struktur hierarkis yang bersifat mendominasi. Dekonstruksi tidak hanya sekedar membalikkan dominasi dalam oposisi biner tersebut, tetapi lebih mencegah terjadinya dominasi antara yang satu dengan yang lainnya (Derrida, 1981: 41-42). Oposisi Biner yang dimaksud oleh Derrida dilihat sejak Ferdinand de Saussure melahirkan ilmu Semiologi (Ilmu tentang tanda). Derrida menilai semiologi Saussurean melampaui tradisi metafisika Barat, tetapi sekaligus masih berada di dalam tradisi tersebut. Saussure menentang tradisi metafisika Barat dengan mengatakan bahwa tinanda (konsep) tidak terpisahkan dari penanda (aspek material dari tanda). Keduanya merupakan 'dua sisi dalam kesatuan' dari sebuah tanda yang berasal dari sebuah proses penandaan. Derrida berpendapat bahwa, makna sebuah tanda (kesatuan penanda-tinanda) diperoleh dari perbedaan tanda tersebut dengan tanda-tanda yang lain (Derrida, 1976: 18).

Yang terjadi kemudian, adalah pertentangan antara dua kutub atau oposisi biner, misalnya antara *laki-laki* dengan *perempuan*, *terang* dan *gelap*, *ide* dan wujud, atau *tubuh* dan jiwa. Menurut Derrida, perolehan makna melalui oposisi bukan sebuah masalah, sebab dengan cara itulah bahasa beroperasi. Baginya, yang menjadi permasalahan, adalah ketika salah satu entitas dalam oposisi tersebut diunggulkan dan mendominasi entitas yang lain. Hierarkisasi inilah yang menjadi masalah, misalnya *perempuan* memperoleh makna hanya ketika dikaitkan dengan *laki-laki*, dengan kata lain, laki-laki dianggap lebih unggul

dibandingkan dengan perempuan. Begitu juga yang terjadi dengan *terang* dan gelap serta *tubuh* dan jiwa.

Dalam tradisi metafisika Barat, hierarki ini tampak jelas dalam pemahaman mengenai tanda itu sendiri, yaitu dalam pemisahan absolut antara penanda dan tinanda. Perbedaan kaku ini memberikan kemungkinan untuk berpikir mengenai sebuah konsep yang hadir bagi pikiran yang tidak terkait dengan bahasa, artinya tidak terkait dengan rangkaian penanda-penanda (Derrida, 1976: 19). Inilah yang disebut Derrida sebagai tinanda transendental yang menjadi sumber makna bagi semua tanda, dimana penanda (signifier) dipandang sebagai derivasi dari tinanda (signified). Masalahnya kemudian menjadi semakin gawat ketika hierarkis seperti ini justru mengalami institusionalisasi di dalam tradisi kebudayaan manusia dalam arti seluas-luasnya. Misalnya, budaya Patriarki yang di dasari oleh pemahaman, bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan, atau *Barat* yang lebih unggul dibandingkan *Timur* (Said: 1983).

Contoh di atas diberikan untuk memperlihatkan dominasi hierarkis yang terjadi di dalam oposisi biner metafisika Barat yang perlu untuk di dekonstruksi. Tentu saja dekonstruksi Derrida akan lebih abstrak dan rumit dibandingkan contoh-contoh di atas. Mendekonstruksi filsafat, bagi Derrida berarti tidak hanya memikirkan genealogi terstruktur konsep-konsep filsafat, tetapi juga memperlihatkan bagian-bagian yang tidak tersentuh oleh filsafat karena tekanan-tekanan tradisi yang ada (Derrida, 1981: 6).

Tradisi filsafat barat berhasrat untuk meng-universal-kan segala bentuk partikularitas. Yang universal selanjutnya diyakini sebagai kebenaran yang objektif. Objektivitasnya tidak terkait dengan subjektivitas individu maupun berbagai perubahan yang terjadi di dalam sejarah. Kebenarannya terbebas dari kontingensi karena sifatnya yang absolut dan transenden, di luar pengalaman yang partikular. Metafisika telah membebani epistemologi untuk merengkuh kebenaran dalam totalitasnya dengan menepikan perbedaan-perbedaan yang implisit dalam totalitas itu.

Dekonstruksi merupakan tantangan terhadap totalitas makna, penafsiran, atau pengetahuan yang mengalami institusionalisasi dalam sejarah yang menginginkan satu sistem

tunggal yang koheren. Dari sudut pandang ini, dekonstruksi dapat disebut sebagai hermeneutika yang menyajikan tafsir tanpa berpretensi untuk menjadi satu-satunya pemilik otoritas yang sepenuhnya menguasai makna yang ada. Tafsir sebuah dekonstruksi berasal dari sebuah kepekaan akan adanya perbedaan yang mungkin hadir, entah kapan, dari suatu benda, suatu pengalaman, atau ingatan. Menurut Derrida, seorang penafsir yang baik tidak memperlakukan apa yang dia tafsirkan sebagai objek terpisah dari dirinya, dan alih-alih mengakui bahwa ia juga membentuk pengalaman dirinya sebagai penafsir (Derrida, 1978: 88).

Tentu saja dekonstruksi bukan sebuah ajakan untuk bersikap nihilistik terhadap kebenaran dan makna. Dekonstruksi melampaui nihilisme naif yang dengan membabi buta meyakini bahwa tidak ada lagi kebenaran yang dapat dipegang. Demikian pula, dekonstruksi juga melampaui dogmatisme tradisional yang meyakini bahwa hanya ada satu kebenaran. Dekonstruksi lebih merupakan sebuah strategi untuk tidak melihat kebenaran yang kita yakini sebagai satu-satunya kebenaran. Ada banyak kebenaran, terlalu banyak, dan kita dapat memilih berbagai kebenaran itu sejauh yang kita butuhkan. Karena terdapat banyak kebenaran, kebenaran sendiri tidak akan pernah tercapai dalam suatu totalitas yang dominan (Derrida, 1979: 57).

Dalam dekonstruksi, Derrida memberikan tiga konsep yang disebut *sans savoir*, *sans avoir*, dan *sans voir*. *Sans Savoir* (tidak mengetahui) menggambarkan bahwa sebuah teks tidak selalu ditangkap oleh penafsir dalam totalitasnya, sehingga ada kerendahan hati penafsir karena tidak memiliki otoritas pengetahuan atas tafsirannya. *Sans Avoir* (tidak memiliki) berarti bahwa kebenaran didevaluasi dari klaim otoritatifnya. Kebenaran tidak lagi berada pada penafsir, melainkan bergerak ke penafsiran-penafsiran lain yang beda. Tak ada lagi otoritas *authortransendental* yang memiliki kekuasaan atas teks. *Sans Voir* (tidak melihat) mengisyaratkan sebuah keterbatasan indera dan penglihatan kita akan kebenaran (Caputo, 1987: 157).

C. Quo Vadis Pendidikan Indonesia: Sebuah Refleksi Posmodernistik

Sistem pendidikan yang ada di Indonesia masih mengacu pada kecenderungan kekuasaan politis. Para penguasa terlalu banyak mencampuri, bahkan mengarahkan sistem pendidikan ini sehingga apa yang disebut filsafat pendidikan sebagai dasar, nyaris tidak tampak dalam praktik pendidikan di Indonesia. Sekolah sebagai bentuk pendidikan lebih banyak digunakan sebagai 'kendaraan' untuk transmisi sosial membangun kehidupan bersama dengan dalih untuk mengembangkan keesaan, konvergensi dan keseragaman tujuan pembangunan. Dalam hal ini, pembentukan karakter manusia Indonesia seutuhnya justru tereduksi dalam pendidikan.

Demikian pula tujuan pendidikan, yang mengacu pada tujuan pembangunan bangsa dan negara juga menuntut konvergensi perilaku, sehingga banyak hal yang orisinal, lateral dan baru sering dianggap mengganggu keselarasan dan kesesuaian corak kehidupan bangsa. Ini berarti, bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih bersifat status quo dan terutama memprioritaskan stabilitas dan keseragaman (Semiawan, 2000: 33).

Tujuan pembangunan di atas, kemudian diidentikkan dengan hal-hal yang bersifat fisik atau materi, sehingga pembelajaran dan penguasaan iptek menjadi primadona di semua lembaga pendidikan, sejak tingkat SD sampai perguruan tinggi. Pendidikan semata-mata merupakan instrumen pembangunan ekonomi, di mana pendidikan hanya dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja saja yang ada. Dapat ditambahkan juga, pendidikan hanya sekedar sebuah proses sosialisasi, dalam arti menginisiasi generasi muda sedemikian rupa hingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Inilah yang beresiko menjadi pelestarian status quo yang statis.

Sampai sekarang ini, kurikulum di Indonesia, terutama pendidikan dasar dan menengah masih sentralistik. Tidak hanya garis-garis besar program pengajaran dari setiap mata pelajaran, tetapi juga bentuk evaluasi dan standarisasi penilaian masih sangat sentralistik. Hal yang kini masih menjadi pro dan kontra

yang begitu marak adalah mengenai ujian nasional. Yang menjadi masalah kemudian tidak hanya tuntutan konvergensi atau keseragaman dari seluruh penjuru sekolah di Indonesia yang pada kenyataan begitu berbeda, tetapi juga amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas untuk memberdayakan siswa dalam proses pembelajaran dan menekankan penilaian secara komprehensif (yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik) tidak terimplementasi melalui adanya ujian nasional tersebut. Dalam penentuan kelulusan siswa, yang ada hanya penilaian dari aspek kognitif saja. Padahal pendidikan bukan sekedar berbicara angka-angka.

Pendidikan merupakan proses humanisasi, pengembangan manusia seluas-luasnya agar manusia berkembang menjadi manusia seutuhnya; sebagaimana disuarakan oleh para praktisi pendidikan diantaranya Fuad Hassan yang mendasarkan pendidikan pada nilai-nilai adiluhung bangsa sendiri dan humanitas (Hassan, 1995: 137-147). Sementara Driyarkara melihat bahwa pendidikan memiliki tujuan mulia yaitu mengangkat manusia menuju tingkat insani; Freire berpandangan bahwa pendidikan bertujuan memanusiakan manusia, dan Romo Mangun menekankan pentingnya pendidikan sebagai wujud pemerdekaan atau pembebasan (Yunus, 2007: 126).

Selanjutnya, kegagalan peserta didik dalam ujian nasional tadi justru diselesaikan dengan cara yang cenderung keliru, yaitu dengan menambah intensitas pelajaran. Dengan kata lain, pendidikan hanya dilihat dalam kerangka pikir penerusan materi (*content transmission model*). Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila semua pihak berlomba-lomba menyatakan kehendaknya untuk menambah materi kurikulum dan atau jam pelajaran dalam rangka menjawab berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat mulai dari peningkatan tertib berlalu-lintas, penghentian tawuran, narkoba, hingga penyebaran AIDS (Raka Joni, 2000: 41). Contohnya adalah penambahan mata pelajaran 'Budi Pekerti' dengan anggapan generasi muda tidak memiliki budi pekerti yang baik.

Globalisasi yang juga melanda dunia pendidikan semakin menyadarkan kita, bahwa pendidikan di Indonesia

sudah terlanjur tertinggal jauh dari pendidikan Barat, sehingga kita terkondisikan dengan 'kenyataan' bahwa sistem, bentuk, struktur, model, dan materi dari Barat pasti lebih baik. Hal ini membuat kita terburu-buru membuat sekolah atau kelas dengan kurikulum berstandar internasional. Padahal nyatanya, sarana dan sumber daya manusia yang kita miliki belum siap untuk itu. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era globalisasi dan pasar bebas, tidak sekedar memposisikan mata pelajaran bahasa Inggris lebih penting daripada mata pelajaran lain dengan menempatkannya di dalam Ujian Nasional. Atau juga dengan membentuk kurikulum standar internasional dengan bahasa pengantar, bahasa Inggris.

Secara mendasar, pendidikan di Indonesia dapat dikatakan dibangun di atas landasan paradigma filsafat modern yang menekankan pentingnya pokok bahasan (*subject matter*) pada setiap bidang. Pokok bahasan itu dianggap memiliki kebenaran absolut yang harus diajarkan kepada siswa dari dulu dan seterusnya. Menurut tradisi modern tersebut, pengetahuan lebih merupakan sesuatu yang sudah jadi dan tinggal dipindahkan kepada siswa, bahkan isi pengetahuan yang akan disampaikan sudah dipilih dan ditentukan oleh penentu kebijakan pendidikan (Suparno, 2000: 50). Akibatnya lebih lanjut, kerancuan dasar filsafat yang digunakan dalam pendidikan di Indonesia membuat pendidikan menjadi sasaran empuk materialisme dan kapitalisme. Satu bentuk nyata adalah digolongkannya pendidikan sebagai sebuah usaha terbuka. Hal ini sudah dimulai dengan adanya otonomi di beberapa Perguruan Tinggi Negeri. Kecurigaan yang timbul adalah bahwa pemerintah hendak melepaskan diri dari tanggung jawab membiayai pendidikan di Indonesia. Tentu saja komersialisasi pendidikan berarti meningkatnya biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia. Materialisasi juga mengakibatkan pendidikan lebih mementingkan citra penampakan (*appearance*) daripada eksistensi (*being*). Pendidikan lebih cenderung menampilkan apa yang disebut sebagai *Pseudo-truth* dibandingkan *truth* itu sendiri (Baudrillard, 1993: 23). Hal ini tampak pada pementingan gengsi kuantitas material dalam

pendidikan, misalnya gengsi study tour, bangunan mewah, dan sebagainya.

Inilah yang menjadi kritik dari posmodernisme. Posmodernisme pada dasarnya tidak bertendensi untuk menjadi sebuah filsafat pendidikan baru untuk menggantikan filsafat pendidikan yang sudah ada. Posmodernisme secara sederhana membantu kita untuk menjadi lebih menyadari bahwa realitas itu lebih kompleks dan rumit dari apa yang kita hadapi. Modernisme telah membawa manusia modern mengalami apa yang disebut oleh Fredric Jameson sebagai *schizofrenia*, yaitu ketika manusia mengalami fragmentasi waktu, puas dengan yang ada. Jameson (dan juga Lyotard) mengajak pendidikan di Indonesia untuk tidak puas dengan yang ada, artinya tidak berhenti pada keahlian atas sesuatu (*homologi ahli*), tetapi juga dapat menciptakan sesuatu (*paralogi pencipta*) (Piliang: 203).

Posmodernisme lebih cenderung untuk melihat ukuran keberhasilan pendidikan berdasar pada narasi yang *open-ended*, karena eksistensi manusia tidak dapat direduksi secara positivistik-kuantitatif, hitam atau putih (lulus atau tidak lulus). Lyotard mengharapkan fleksibilitas pengetahuan narasi, dimana narasi kognitif berjejaring dengan narasi moral dan estetis. Ini juga cenderung bersifat desentralistik dan penghargaan atas *otherness* yang memperhatikan kenyataan-kenyataan lokal, termasuk di dalamnya nilai dan budaya lokal-tradisional yang selama ini mengalami marjinalisasi. Konkretnya, setiap daerah, bahkan setiap sekolah diberi keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan keadaan daerah masing-masing dan kemampuan peserta didik yang ada (Suparno: 55). Kebenaran yang tidak harus absolut dapat dilihat secara praktis, misalnya penyelesaian soal fisika atau kimia, di mana siswa diperbolehkan untuk menjawab soal dengan cara yang tidak sama dengan yang diajarkan oleh guru sebagai sebuah alternatif mencapai kebenaran.

Di dalam proses pembelajaran, orientasi yang digunakan tidak lagi *teacher-centered learning* atau *student-centered learning*, tetapi lebih berupa *teacher-student learning together*. Ini berarti tidak lagi menggunakan apa yang disebut oleh Paulo Freire sebagai *banking system*. Kemudian, sama halnya dengan

pendidikan yang memiliki hubungan keharusan dengan filsafat, pengetahuan juga memiliki hubungan keniscayaan dengan nilai, budaya, dan terus-menerus mengalami perubahan. Sekali lagi, sejalan dengan posmodernisme, tulisan ini tidak berusaha untuk mencari sebuah filsafat yang absolut dan universal sebagai dasar pendidikan. Tetapi, biarlah kita sebagai bagian dari pendidikan Indonesia untuk menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang terbuka.

D. Penutup

Paradigma posmodern adalah pluralitas bahwa kenyataan itu dibangun di atas realitas yang kompleks- hal ini berbanding lurus dengan karakteristik kehidupan kita dalam berbangsa yang berdimensi multikultural. Oleh sebab itu, gagasan mengenai pendidikan multikultural atau pendidikan berbasis realitas sosial sebagaimana ditawarkan oleh para praktisi pendidikan- diantaranya Fuad Hassan, Driyarkara, Freire, dan Romo Mangun- seyogyanya mampu diimplementasikan dalam praktik- praktik pendidikan dan tidak sekedar berada dalam tataran teoritis utopis semata. Artinya, pendidikan seharusnya berbasis pada kebudayaan masing-masing bangsa sehingga pendidikan berorientasi pada pembentukan karakter. Sebab, pendidikan bukan sekedar upaya penyampaian pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada peserta didik, tetapi juga sebuah upaya penyampaian nilai (*transfer of value*).

Keberhasilan sebuah pendidikan tidak hanya terukur dari tingkat kemampuan peserta didik pada ranah kognitif semata-mata, tetapi juga terukur dari ranah lainnya yang tidak bisa diabaikan yaitu ranah afektif dan psikomotrik. Tujuan pendidikan tertinggi adalah pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan adalah sebuah proses *humanisasi* (memanusiakan manusia). Oleh sebab itu, bagi posmodernisme evaluasi pendidikan tidak diukur dengan angka-angka mutlak seperti lewat ujian nasional yang dijadikan satu-satunya standar kelulusan. Potensi lain pada diri anak atau peserta didik juga seharusnya dihargai, agar mereka bisa berkembang secara optimal sebagai manusia seutuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Awuy, Tommy F. 1995. *Wacana Tragedi dan Dekonstruksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Jentera.
- Baudrillard, Jean. 1993. *The Transparency of Evil: Essays on Extreme Phenomena.*, London: Verso.
- Caputo, John D. 1987. *Radical Hermeneutics: Repetition, Deconstruction, and the Hermeneutic Project*. Indianapolis: Indiana University Press.
- Coward, Rosalind and John Ellis. *Language and Materialis*. London: Routledge.
- Chritchley, Simon. 1992. *The Ethics of Deconstruction: Derrida & Levinas*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Derrida, Jacques. 1976. *Of Grammatology*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- _____ 1978. *Writing and Difference*. Chicago: University of Chicago Press.
- _____ 1979. *Spurs: Nietzsche Styles*. Chicago: University of Chicago.
- _____ 1981. *Positions*. Chicago: University of Chicago Press.
- _____ 1982. *Margins of Philosophy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hardiman, F. Budi. 2007. *Filsafat Fragmentaris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hassan, Fuad. 1995. *Dimensi Budaya dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Piliang, Yasraf Amir. 2003. *Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Rice, P. & P. Waugh (ed). 1996. *Modern Literary Theory: A Reader, Third Edition*, London: Hodder Headline Group.
- Said, Edward W. 1983. *The World, The Text, and The Critic*. Cambridge: Harvard University Press.

- Semiawan, Conny. 2000. *Relevansi Kurikulum Masa Depan*. Jakarta: Basis Nomor 07-08, Juli- Agustus 2000.
- Sugiharto, I. Bambang. 1996. *Posmodernisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ward, G. 2003. *Teach Yourself: Posmodernism*. London Hodder & Stoughton Ltd.
- Yunus, Firdaus M. 2007. *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial*. Yogyakarta: Logung Pustaka.